

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan SPIP di UPT Cagar Budaya Yogyakarta

Penelitian ini didasarkan pada penerapan SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan SPIP di UPT Cagar Budaya Yogyakarta yang belum optimal dilihat dari komponen SPIP dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali guna meningkatkan PAD Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Penerapan unsur lingkungan pengendalian di UPT Cagar Budaya Yogyakarta, menunjukkan pelaksanaan yang kurang memadai. UPT Cagar Budaya belum memiliki sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran disiplin petugas parkir, hanya memberlakukan teguran sebagai sanksi.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko yang terdapat di UPT Cagar Budaya Yogyakarta dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008. Unsur penilaian resiko sudah dilaksanakan dengan mengidentifikasi berbagai resiko sejak awal pelaksanaan

retribusi parkir, mengenali lebih banyak risiko dari berbagai faktor, serta menentukan cara penyelesaiannya.

c. Kegiatan Pengendalian

Pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian oleh UPT Cagar Budaya sudah berjalan, namun masih perlu penerapan yang lebih mendalam terkait pengendalian. Hingga saat ini belum adanya SOP tertulis yang jelas yang dimiliki UPT Cagar Budaya Yogyakarta, selain itu terdapat kekurangan SDM yang menyebabkan adanya *double job* yang dibebankan kepada pegawai yang ada.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang disajikan oleh UPT Cagar Budaya Yogyakarta sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan atau prosedur terkait pengelolaan informasi dan komunikasi yang terdapat di UPT Cagar Budaya Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya media sosial seperti website digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan UPT Cagar Budaya kepada masyarakat.

e. Pemantauan

Pada UPT Cagar Budaya Yogyakarta unsur pemantauan belum dilakukan secara maksimal, dapat dilihat dari kurangnya pengawasan atau pemantauan yang dilakukan terhadap parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta. pemantauan dilaksanakan melalui patroli ke titik lokasi parkir pada waktu-waktu tertentu dan belum secara berkala oleh petugas pemantauan, melainkan hanya saat terjadi masalah di lapangan.

Pada penelitian yang dilakukan di UPT Cagar Budaya ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menerapkan unsur SPIP secara maksimal. Dapat dilihat dari lima unsur pengendalian belum berjalan dengan baik, unsur-unsur tersebut disimpulkan pada poin nomor dua.

2. Kendala yang dihadapi oleh UPT Cagar Budaya Yogyakarta dalam pengelolaan taman partir Abu Bakar Ali

- a. Lingkungan pengendalian: Penerapan unsur lingkungan pengendalian di UPT Cagar Budaya Yogyakarta, menunjukkan pelaksanaan yang kurang memadai. Namun, UPT Cagar Budaya belum memiliki sanksi pidana yang tegas atas pelanggaran disiplin petugas parkir.
- b. Kegiatan pengendalian: belum adanya SOP tertulis yang jelas yang dimiliki UPT Cagar Budaya Yogyakarta, selain itu terdapat kekurangan SDM yang menyebabkan adanya *double job* yang dibebankan kepada pegawai yang ada.
- c. Pemantauan: Kurangnya pemantauan yang mengakibatkan adanya kecurangan berupa memalsukan karcis parkir dengan mengubah tarif dan memberikan kedua karcis kepada pengunjung yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Penerapan SPIP yang sudah berjalan di UPT Cagar Budaya Yogyakarta masih memerlukan pengendalian dan pengawasan yang lebih optimal untuk mendukung pencapaian target, terutama dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Semakin baik pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh UPT Cagar Budaya, maka semakin baik pula pencapaian target pendapatan retribusi parkir di UPT Cagar Budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran berupa rekomendasi sebagai berikut:

1. Ke depannya, UPT Cagar Budaya hendaknya memaksimalkan jadwal pemantauan untuk memantau kondisi parkir Abu Bakar Ali dan juru parkir di lapangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan mengurangi risiko yang muncul, sehingga UPT Cagar Budaya Yogyakarta dapat mengetahui perkembangan potensi titik lokasi parkir yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan target setoran juru parkir berikutnya.
2. UPT Cagar Budaya sebaiknya membuat dan menegakkan sanksi bagi juru parkir lapangan yang berusaha memanipulasi setoran pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan penyalahgunaan karcis parkir. Dengan begitu, juru parkir dan koordinator lapangan tidak akan berani melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
3. UPT Cagar Budaya perlu menciptakan inovasi sistem untuk pencatatan penyetoran retribusi parkir secara online. Sehingga, waktu untuk penyetoran retribusi parkir ke Kas Daerah sesuai dengan perda yang berlaku dapat dipenuhi.
4. Mengadakan evaluasi bersama juru parkir dalam satu tempat, sehingga segala permasalahan atau kendala yang mereka alami dapat disampaikan dan diselesaikan dengan baik.

5. Memaksimalkan penerapan SPIP di lingkungan UPT Cagar Budaya Yogyakarta, sehingga penyelenggaraan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Ini akan membantu UPT Cagar Budaya dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir dari dinas terkait serta mencapai tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang diperoleh maka keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Subjek penelitian kurang luas karena hanya melibatkan sedikit narasumber, yakni penanggung jawab pengelolaan parkir Abu Bakar Ali, Kasi Pemanfaatan, staf pemanfaatan, dan juru parkir sebagai pengelola langsung di lapangan. Keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi dalam penelitian selanjutnya agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat dengan melibatkan masyarakat desa, sehingga memperluas pandangan terkait penelitian ini.
2. Terdapat kendala dalam mendapatkan beberapa data yang diperlukan karena UPT Cagar Budaya baru saja merolling beberapa pegawai, sehingga beberapa data masih berada pada pegawai yang menjabat sebelumnya. Data yang dimaksud, seperti SOP yang diterapkan di UPT Cagar Budaya, belum menetapkan SOP yang jelas. Hal ini membuat peneliti terkendala dalam memperoleh data yang diperlukan.

3. Keterbatasan data yang diperoleh melalui media internet karena data yang dijadikan hanya seputar rencana dan update seputar informasi berkenaan parkir Abu Bakar Ali. Namun, data mengenai profil UPT Cagar Budaya, struktur organisasi, dan tugas dan wewenang dari pejabat yang bertugas.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA